



## URGENSI PENGEMBANGAN KURIKULUM STIK UNTUK MENGHASILKAN SDM POLRI YANG UNGGUL DAN BERKUALITAS

<sup>1</sup>Endry Boeriswati, <sup>2</sup>Nurhattati, <sup>3\*</sup>Muh. Aziz Muslim

<sup>1</sup>Program Pascasarjana UNJ; e-mail: ebboeris@gmail.com

<sup>2</sup>Program Pascasarjana UNJ

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Administrasi UI; e-mail: muhazismuslim01@gmail.com

### Abstract

*The development in technology, politics, demography, and the economy in Indonesia takes place almost simultaneously and instantly. This has an impact on the transformation of personal life on a large and complex scale, including social life in the community. The police as security enforcement officers are required to have competence in accordance with the development of science and technology used by the community, so that the police can maintain security and public order, enforce the law and protect and serve the community. Present and future police are police who have knowledge that is adaptive to the development of science and technology. Therefore, police education must be able to equip graduates with adaptive knowledge that is relevant to the current and future needs of society.*

**Keywords:** *academic culture, curriculum, official higher education, education system*

### Abstrak

Perkembangan teknologi, politik, demografi, dan ekonomi di Indonesia berlangsung secara hampir bersamaan dan terjadi secara instan. Hal ini berdampak pada terjadinya transformasi kehidupan personal dalam skala besar dan kompleks, termasuk di dalamnya kehidupan social bermasyarakat. Polisi sebagai aparat penegak keamanan dituntut memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat, sehingga polisi dapat melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi masa kini dan masa depan adalah polisi yang memiliki pengetahuan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu pendidikan kepolisian harus dapat membekali lulusan dengan pengetahuan adaptif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa depan

**Kata kunci :** *budaya akademik, kurikulum, pendidikan tinggi kedinasan, sistem pendidikan*

## Pendahuluan

Polisi masa kini dan masa depan adalah polisi yang memiliki pengetahuan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu pendidikan kepolisian harus dapat membekali lulusan dengan pengetahuan adaptif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa depan. Pendidikan kepolisian merupakan pendidikan keprofesionalan untuk menghasilkan polisi profesional yang menekankan pada pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat sangat penting untuk memastikan polisi dalam menghadapi dinamika perubahan masyarakat yang kompleks. (Blakemore dan Simpson 2010).

Pendidikan kepolisian di Indonesia (selanjutnya disebut dengan Pendidikan Polri) salah satunya adalah Perguruan Tinggi Tinggi Ilmu Kepolisian yang merupakan jenis pendidikan akademik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyatakan Pendidikan akademik di tingkat pendidikan tinggi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Pendidikan akademik mengutamakan peningkatan mutu dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan yang terdiri atas Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana (Program Magister dan Program Doktor). Hal ini sejalan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Perguruan Tinggi Tinggi Ilmu Kepolisian adalah pendidikan akademik, maka diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 pasal 25 dan 26 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pendidikan POLRI mengacu standar nasional pendidikan tinggi dan pengembangan Capaian Pembelajaran mengacu pada KKNI, maka pengembangan kurikulum pun mengacu SNI/TKI dan KKNI.

Pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri atas tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 128). Kurikulum dikembangkan untuk menentukan pengalaman atau capaian apa yang akan diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Kurikulum dapat didefinisikan secara luas sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman dari peserta didik. Pandangan ini menganggap hampir semua hal di satuan pendidikan adalah merupakan bagian dari kurikulum (Allan C.Orstein, 2004). Mengapa kurikulum harus mengalami perkembangan dan perubahan? karena kurikulum harus mampu menjawab tantangan terhadap kebutuhan peserta didik sesuai perkembangan zaman. Hal penting yang mampu dijawab oleh sebuah kurikulum adalah apakah output lembaga pendidikan mampu bersaing dan terserap di lapangan kerja? Apakah kurikulum mampu membekali peserta didik dengan ketahanan untuk bisa melangsungkan hidup di masa depan?, apakah peserta didik dibekali dengan kemampuan adaptasi dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman serta teknologi?. Hal inilah yang mengharuskan kurikulum bersifat dinamis juga fleksibel, membaca semua kebutuhan peserta didik akan pengalaman belajar apa yang mereka perlukan dan perkembangan kurikulum yang sering terjadi, sudah tidak dianggap suatu hal yang aneh dengan syarat terus dilakukan evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan sebelumnya sebagai landasan melakukan perbaikan-perbaikan (Handelzalts, 2019)

Pengembangan kurikulum harus pula memperhatikan kebutuhan pembelajaran Era Industri 4.0 dan *Society 5.0*. Konsep pendidikan yang dibangun pada Era Revolusi industri 4.0

yaitu digitalisasi dan komputerisasi. *Era Society 5.0* dalam dunia pendidikan menekankan pada pendidikan karakter, moral, dan keteladanan. Hal ini dikarenakan ilmu yang dimiliki dapat digantikan oleh teknologi sedangkan penerapan *soft skill* maupun *hard skill* yang dimiliki tiap peserta didik tidak dapat digantikan oleh teknologi. Dalam hal ini diperlukan kesiapan dalam hal pendidikan berbasis kompetensi, pemahaman dan pemanfaatan IoT (*Internet of Things*), pemanfaatan virtual atau *augmented reality* dan penggunaan serta pemanfaatan AI (*Artificial Intelligence*).

Berdasarkan analisis di atas, permasalahan penelitian dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- (1) Bagaimana ekspektasi masyarakat dan pengguna terhadap lulusan STIK?
- (2) Bagaimana pengembangan kurikulum untuk meningkatkan kualitas lulusan?

## **Tinjauan Literatur**

### **Kurikulum Pendidikan Tinggi**

Abad 21 menuntut peserta didik untuk memiliki kecakapan atau keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill* yang mumpuni agar dapat terjun ke dunia pekerjaan dan siap berkompetisi dengan negara lain. Keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad 21 menurut Bernie Trilling dan Charles Fadel (2009:48): “*the core subjects and interdisciplinary 21st century themes are surrounded by three sets of skills most in demand in the 21st century: (i) learning and innovation skills, (ii) information, media and technology skills, (iii) life and career skills*”. National Education Association (2002) juga menyatakan bahwa terdapat 18 macam 21st Century Skills yang perlu dibekalkan pada setiap individu, di mana salah satunya ialah *Learning and Innovation Skills* yang terdiri dari 4 aspek, yaitu *critical thinking* (berpikir kritis), *communication* (komunikasi), *collaboration* (kolaborasi/ kerjasama), dan *creativity* (kreativitas). *Learning and Innovation Skills 4Cs* dapat dikuasai melalui pendidikan.

Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani *curir* = pelari dan *curere*= lintasan lari atau lintasan pacu. Jadi menurut asal katanya kurikulum adalah lintasan lari atau lintasan pacu tempat berlarnya para peserta dalam lomba berlari. Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali/penghargaan. Pada zaman Romawi kuno kurikulum merupakan kata yang digunakan untuk lintasan pacu kereta. “Julius Caesar” sebagai kaisar Romawi pada saat itu, tidak akan menyangka jika istilah kurikulum akan berkembang menjadi istilah rumit dan khas yang ada dalam bidang pendidikan seperti dewasa ini.

Beberapa pengertian kurikulum menurut para ahli, sebagai berikut :

- a. Harold B. Albery (1965) memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah (*all of the activities that are provided for the students by the school*). Kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja, tetapi mencakup juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kelas.
- b. Saylor, Alexander, dan Lewis (1974) yang menganggap kurikulum sebagai segala upaya yang dilakukan sekolah untuk memotivasi siswa agar belajar, baik dalam ruangan kelas, di halaman Perguruan Tinggi, maupun di luar Perguruan Tinggi.
- c. Henry C. Morris (1940), “...*the content of instruction without reference to*

*instructional ways or means”*

- d. Peter F. Oliva (1997:12), “...*curriculum it self is a construct or concept, a verbalization of an extremely complex idea or set of ideas”*.”
- e. Hilda Taba (1962), “.....*A curriculum is a plan for learning; therefore, what is known about the learning process and the development of the individual has bearing on the shaping of curriculum”*”

Dalam UU No.20 tahun 2003 pasal 1 ayat (19), konstitusi menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum bagi masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkannya relevan atau tidak dengan kurikulum suatu Perguruan Tinggi tersebut.

Perubahan kurikulum adalah suatu keniscayaan mengingat *no change no future*, menyadari perkembangan kurikulum lebih diarahkannya pada upaya pemberdayaan peserta didik agar mampu secara aktif dan mandiri mempelajari materi pelajaran itu di luar kelas bahkan di luar sekolah. Caswel & Compbell dalam Ansyar (1989) menemukan bahwa sangat kecilnya kesesuaian antara kurikulum formal (dokumen) dengan implementasinya di lapangan.

Tidak bisa disangkal bahwa kurikulum berkembang terus dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Seorang pendidik pernah berkata: “Jika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang dengan sangat cepat ini, diperkirakan dua puluh tahun ke depan kita akan menjadi manusia purba” (Kusumaningrum, 2001). kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut. Bila dikaji pembelajaran yang diamanatkan dalam KKNi itu mampu mendukung era industri 4.0. Menurut Leclercq pembelajaran era industri 4.0. adalah pembelajaran yang dapat memperluas wawasan peserta didik, maka diperlukan adanya kemampuan untuk mengembangkan:

- 1) Kemampuan mengantisipasi (*anticipate*)—Pembelajaran dilaksanakan untuk menyiapkan peserta didik dapat mengantisipasi perkembangan IPTEK yang begitu cepat.
- 2) Mengerti dan mengatasi situasi (*scope*)—Mengembangkan kemampuan dan sikap peserta didik untuk dapat menangani dan berhadapan dengan situasi baru. Rasa kepedulian terhadap suatu masalah serta keinginan untuk mengatasi masalah merupakan faktor yang harus dikembangkan pada diri peserta didik.
- 3) Mengakomodasi (*accomodate*)—Mengakomodasi perkembangan IPTEK yang pesat dan segala perubahan yang ditimbulkannya. Dalam mengatasi dan

mengakomodasi perlu dikembangkan sikap bahwa peserta didik tidak larut oleh perubahan, tetapi ia harus mampu mengikuti dan mengendalikan perubahan agar tumbuh menjadi suatu yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan.

- 4) Mereorientasi (*reorient*)—Persepsi dan wawasan kita tentang dunia perlu diorientasikan kembali karena perkembangan IPTEK dan perubahan sosial yang cepat. Pembelajaran digunakan untuk menumbuhkan kemampuan reorientasi sikap dan nilai, sehingga memperoleh wawasan yang semakin luas.

Dengan bekal pembelajaran seperti di atas, lulusan akan siap menerima perubahan semisal dengan perubahan peran manusia dalam pekerjaan di era industry 4.0, di mana sudah terjadi bahkan sudah terjadi pergeseran pekerjaan atau *job shifting*. Semua orang yang memiliki *background* akademik tidak lagi bergantung pada pekerjaan yang sesuai dengan gelarnya saja. Profesi lama bisa jadi akan hilang dan pekerjaan baru akan datang. Inilah yang disebut dengan *disruption technology* atau gangguan teknologi akan berdampak munculnya profesi atau bidang pekerjaan baru yang berbasis pada kombinasi teknologi antara lain: (1) *Internet of Things*, (2) *Artificial Intelligence*, (3) *New Materials*, (4) *Big Data*, (5) *Robotics*, (6) *Augmented Reality*, (7) *Cloud Computing*, (8) *Additive Manufacturing 3D Printing*, (9) *Nanotech & Biotech*, (10) *Genetic Editing*, dan (11) *E-Learning*. Di mana hal ini akan diintegrasikan dalam pembelajaran? Bagaimana pengajar mengetahui bahwa hal tersebut telah ditumbuhkan pada peserta didiknya?

Beberapa pendapat di atas dalam mendefinisikan kurikulum lebih menekankan pada penyusunan sebuah rencana atau tujuan tentang apa yang harus dicapai peserta didik dalam pembelajaran satu set atau satu rangkaian dengan sarana apa yang harus disiapkan untuk mencapai rencana atau tujuan tersebut. Bagaimana interpretasi kurikulum berikut penjelasan dari Olivia:

*” Interpretation of curriculum: The amorphous nature of the word curriculum has given rise over the years to many interpretations. Madeleine R. Grumet labeled curriculum as a “field of utter confusion.” Depending on their philosophical beliefs, persons have conveyed these interpretations, among others: Curriculum is that which is taught in school, Curriculum is a set of subjects., Curriculum is content, Curriculum is a program of studies, Curriculum is a set of materials, Curriculum is a sequence of courses, Curriculum is a set of performance objectives, Curriculum is a course of study, Curriculum is everything that goes on within the school, including extra-class activities, guidance, and interpersonal relationship, Curriculum is that which is taught both inside and outside of school directed by the school, Curriculum is everything that is planned by school personnel., Curriculum is a series of experiences undergone by learners in school, Curriculum is that which an individual learner experiences as a result of schooling. (Feter, 2004)*

## **Struktur Kurikulum**

Kurikulum kekinian merupakan kurikulum yang mengakomodasi perkembangan IPTEK dan peradaban masyarakat. Pada saat ini perkembangan IPTEK berorientasi pada industry 4.0 dan society 5.0 di mana yang penuh dinamika dan disrupsi menuntut perguruan tinggi untuk dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, tangguh, berdaya saing, dan mampu beradaptasi

Dalam Kurikulum OBE (*Outcome-Based Education*) dikenal istilah Program Education Outcome. Beberapa pihak menafsirkan ini sebagai tujuan program studi namun ada juga yang meyebut dengan istilah Profil Profesional Mandiri-PPM). Tujuan Program Studi merupakan pernyataan yang menggambarkan sejumlah kompetensi yang dipersiapkan dan dirumuskan oleh program studi dalam rangka membekali lulusan guna mendukung perkembangan karir professional mereka. Berikut contoh perumusan Tujuan Program Studi:



79



## Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan *post-positivist*. Menurut definisi Creswell (2014), pendekatan *post-positivist* adalah metode penelitian yang didasarkan pada pengamatan mendalam, melalui penggunaan teori pengujian dan verifikasi. Kajian ini dilakukan di tiga lokus penelitian yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan atas banyaknya alumni yang bertugas di ketiga Polda dengan jenjang yang beragam baik pada level S1 sampai dengan S3. Pada jenjang S1 survei dilakukan atas alumni yang berasal dari angkatan 73 hingga Angkatan 77. Survei dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan ekspektasi masyarakat dan pengguna lulusan STIK, sehingga yang menjadi responden adalah atasan langsung dari para alumni STIK.

Data kualitatif kajian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam kepada para pejabat Polda di tiga wilayah yang dilengkapi juga dengan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan pimpinan, pengguna, tokoh masyarakat, media (pers) dan para mitra polisi. Kegiatan penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu pada Nopember dan Desember 2021. Penggunaan dua jenis data dalam kajian ini untuk mendapatkan hasil yang holistic untuk menjawab permasalahan penelitian. Sehingga antara data kuantitatif dan kualitatif saling melengkapi dan menjadi dasar peneliti dalam melakukan triangulasi

## Hasil dan Diskusi

### Survei Pengguna atas kemampuan Lulusan STIK

Dalam rangka memperoleh informasi terkini atas harapan masyarakat dan pengguna atas lulusan PTIK telah dilakukan survey kepada pemangku kepentingan. Pada akhir tahun 2021 berlokasi di 3 Polda telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Survei pengguna yang dilakukan memperoleh responden di Polda Jawa Tengah 31 responden, Polda Jawa Barat terdapat 16 responden dan Polda Metro Jaya 24 responden, sehingga total responden dari survey pengguna lulusan adalah 71 responden. Pengolahan data yang dilakukan dari survey tersebut memberikan informasi sebagai berikut :



**Grafik: Kemampuan Lulusan STIK**

Survei dilakukan dengan 10 indikator yang terdiri dari 1 aspek kepuasan pengguna dalam hal ini atasan langsung dari alumni STIK dan 9 indikator untuk mengetahui kemampuan dan kompetensi lulusan dalam menjalankan tugas yang diemban. Survei ini memiliki 5 skala dari yang paling rendah (skor 1) dan paling tinggi (skor 5). Dari total 10 indikator secara rerata diatas 4,5 yang masuk kategori cenderung tinggi menuju sangat tinggi kemampuan lulusan STIKnya. Skor paling tinggi pada indikator decision making (pengambilan keputusan), hal ini berarti lulusan STIK memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang sangat baik atas berbagai masalah yang ditemukan selama bertugas. Pengambilan keputusan juga merupakan kemampuan strategis yang harus dimiliki oleh setiap individu, dimana perubahan yang berlangsung cepat dalam setiap aspek kehidupan membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Secara berturut-turut kemampuan komunikasi interpersonal, tanggung jawab dan integritas lulusan memiliki skor diatas 4,6. Hal ini mengindikasikan ketiga kemampuan tersebut telah dimiliki lulusan dengan baik. Selanjutnya terdapat 6 indikator lain berupa kemampuan daya kritis, kemampuan kolaboratif, adaptabilitas atas perkembangan teknologi informasi, kemampuan implementasi lulusan dan profesionalitas memperoleh skor di kisaran lebih dari 4,54 -4,57. Pada aspek kepuasan secara umum mendapatkan skor 4,50.

### Ekspektasi Masyarakat dan pengguna lulusan

Tidak ada kurikulum tanpa profil lulusan. Pernyataan profil lulusan merupakan bukti akuntabilitas akademik program studi. Profil lulusan menjadi pembeda program studi satu terhadap program studi lainnya. Profil lulusan adalah deskripsi mengenai atribut mencakup pengetahuan, keahlian, dan sikap—yang diperoleh lulusan dari proses pembelajaran di program studi sebagai bekal lulusan untuk menempuh studi lanjut atau bekerja di masa datang.



Gambar 2 Work Cloud

Profil ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja dan pemangku kepentingan, antisipasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala bentuk konvergensinya, antisipasi terhadap keusangan jenis-jenis pekerjaan dan munculnya



jenis-jenis pekerjaan baru yang sekarang belum ada, analisis jenis-jenis kecakapan yang diperlukan di masa depan, analisis kebutuhan kualifikasi nasional dan atau internasional, serta visi dan misi program studi. Profil lulusan memuat kemampuan yang dimiliki lulusan dalam menjalankan perannya di dunia kerja sesuai dengan bidang keilmuannya. Lulusan prodi untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan Standar Capaian Pembelajaran Lulusan.

Sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran yang lengkap atas harapan masyarakat terhadap alumni STIK, penelitian ini juga mengumpulkan data primer melalui Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di ketiga Polda yang menjadi lokus dalam kajian ini. Lebih lanjut data yang diperoleh kemudian diolah dan ditampilkan dalam gambar *word cloud* dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 di atas.

Merujuk pada hasil word cloud tersebut diperoleh informasi bahwa dalam pandangan masyarakat dan pengguna terdapat tiga aspek yang paling sering muncul dalam FGD. Ketiga konsep tersebut mencakup komunikasi, integritas dan interpersonal skill yang dominan. Dua hal terkait kemampuan berinteraksi yang paling sering disebut adalah komunikasi dan interpersonal skill. Kedua hal ini sangat penting untuk terus ditingkatkan karena area layanan institusi Polri adalah pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Beberapa catatan menunjukkan bahwa aspek komunikasi menempati posisi strategis, ada kebutuhan agar dilakukan Pengenalan adat istiadat (multiculturalism) kepada anggota baru penempatan agar bisa beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Komunikasi dirasa menjadi aspek sangat penting terutama di era disrupsi dan kondisi pandemic seperti saat ini. Nilai integritas juga menjadi perhatian dari masyarakat dan pengguna, integritas ini dimaknai sebagai bertindak secara konsisten antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Kehadiran media sosial yang sangat massive seringkali memunculkan perilaku yang menyimpang dari anggota yang pada akhirnya tersebar luas yang berakibat mencoreng nama baik dan mencemarkan institusi polri. Salah satu masukan dari tokoh masyarakat adalah perlunya peningkatan kemampuan kecerdasan spiritual para alumni selain kecerdasan emosional dan intelektual.

### **Sistim Pendidikan (Sisdik) STIK**

Berdasar hasil FGD dengan pengelola kurikulum dan dosen serta hasil studi dokumentasi, diperoleh informasi bahwa penyelenggaraan kurikulum di STIK sering terkendala dikarenakan belum adanya Sisdik STIK sebagai penjabaran dari Sidi Polri, selain Sisdik Polri yang ada (Peraturan Kepolisian No. 14, Tahun 2015, Tentang Sistem Pendidikan Polri) dinilai sudah tidak relevan dengan tuntutan dan kemajuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sistem pendidikan sebagai keseluruhan dari bagian-bagian komponen pendidikan yang saling terkait dan bekerjasama secara terpadu dalam mencapai tujuan pendidikan sangat penting dimiliki oleh satuan pendidikan, terlebih di STIK. Hal tersebut karena Sisdik di dalamnya mengandung gagasan, prinsip-prinsip, strategi dan metode yang mengatur jalannya pendidikan. Sisdik berfungsi sebagai arah, pedoman dan alat control dalam penyelenggaraan pendidikan dalam upaya pengembangan potensi peserta didik guna mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan.

Dari FGD diperoleh informasi bahwa terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan kurikulum di STIK yang diakibatkan adanya tata kelola kurikulum yang kurang tepat,

diantaranya adalah : (1) STIK belum memiliki otonomi seutuhnya dalam pengembangan kurikulum; (2) Perubahan kurikulum dilakukan sangat cepat (satu tahun satu kali); (3) Kurikulum disusun Biro Kurikulum dan disyahkan oleh Kalemendiklatpol. Kondisi ini seringkali mengakibatkan keterbatasan STIK dalam melakukan perubahan dan pengembangan kurikulum.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, kurikulum merupakan unsur sistem sangat penting. Sesuai tidaknya dokumen kurikulum menentukan efektifitas pelaksanaan pendidikan yang berlangsung. Kurikulum mengarahkan tujuan pendidikan dan proses pelaksanaan hingga evaluasi pendidikan. Kompleksitas, keluasan dan urgensi kurikulum mempersyaratkan perlunya tata kelola kurikulum dengan dengan baik. Tata Kelola kurikulum sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, memudahkan atau mengatur semua kegiatan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolak ukur tercapainya tujuan pendidikan. Tata Kelola kurikulum yang harus diprioritas perbaikannya sesuai permasalahan di atas. Hal ini terkait dengan pembagian tugas dan wewenang berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan kurikulum di STIK.

### **Penguatan Budaya Akademik**

Berdasar hasil wawancara, diskusi terumpun dengan dosen dan mahasiswa, serta studi dokumentasi tentang budaya akademik, diperoleh informasi budaya akademik di lingkungan STIK masih lemah dan perlu ditingkatkan, terutama dalam hal : (1) kegiatan akademik di luar pembelajaran, (2) kerjasama akademik, (3) publikasi ilmiah, (4) interaksi akademik, (5) publikasi ilmiah dan (6) kelengkapan sarana akademik.

Penguatan budaya akademik sangat penting dilakukan di STIK karena secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap mutu Lembaga. Penguatan budaya akademik menjadi “pengondisi lingkungan belajar” dan faktor determinan efektivitas tujuan pendidikan. Penguatan budaya akademik pada dasarnya merupakan upaya penguatan nilai, norma, & dan cara berperilaku (cara berpikir, bertindak, dan bersikap komunitas yang bekerja atau belajar di perguruan tinggi. Nilai (*values*) terkait apa yang dipersepsi dan dinilai baik-buruk, benar-salah, pantas atau tidak. Norma berkaitan dengan tata aturan, kaidah baik tertulis maupun konvensi terkait dengan kehidupan kampus PT. Cara berpikir (*mode of thinking*) terkait dengan paradigma, perspektif, *point of view* yang mengacu/mendasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan (=obyektif, rasional, fackual, sistematis, *politically neutral* dan menjunjung kebenaran ilmiah. Cara bersikap Bersikap (*attitude*) terkait dengan kecenderungan yang rasional ilmiah dan manusiawi. Cara bertindak (*mode of conduct*) terkait dengan tindakan, gerak-gerik, sepek terjang yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah. Dengan demikian, budaya akademik bagi organisasi berfungsi sebagai : (1) Arah/ acuan kerja bagi warga universitas dalam melakukan aktifitas pencapaian tujuan yang disepakati; (2) Dasar pengambilan kebijakan dalam pengembangan universitas; (3) Identitas keunggulan pendidikan tinggi; (4) Alat ukur keberhasilan dan kendali perilaku civitas akademika; (5) Kode etik pendidikan tinggi.

Pengembangan budaya akademik harus diwujudkan secara sistemik, karena berkaitan dengan segenap komponen yang berproses secara berkelindan secara sistemik, yang

menyangkut: kebijakan institusi, dosen, mahasiswa, sumber informasi (perpustakaan, sarana pembelajaran lain), jaringan, budaya belajar, dan infrastruktur.

Terdapat beberapa sub-aspek program budaya akademik yang perlu diprioritaskan.

**1. Penguatan komitmen etik keilmuan dan integritas intelektual.**

Termasuk dalam kegiatan ini adalah upaya menumbuhkan sikap ilmiah(=rasional, kritis, obyektif, jujur, adil dalam melihat dan menilai suatu masalah). Sosok seorang akademisi niscaya merupakan sosok yang mengedepankan prinsip rasionalitas, kekritisian (*criticality*), obyektifitas, kejujuran dan integritas moralitas serta committed pada penegakan nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan.

**2. Intensifikasi dan ekstensifikasi aktifitas akademik (keilmuan).**

Program-program penguatan budaya *academic-meeting* (diskusi, seminar, *roundtable discussion*, debat ilmiah, *coffee-morning*, *workshop*), peresentasi hasil inovasi, publikasi produk keilmuan (melalui media massa dan jurnal ilmiah) merupakan langkah tepat untuk membangun tradisi akademik.

**3. Penumbuhan dan penguatan kepekaan sosial keprofesian.**

Kepekaan dan kepedulian soaial merupakan modal sosio-psikologik terpenting untuk mewujudkan pengabdian kepada masyarakat luas. Problema sosial-politik, ekonomi, dan budaya yang berkaitan dengan tugas skepolisian demikian besar dan kompleksnya merupakan tantangan untuk dicarikan cara-cara efektif solusinya sebagai bentuk akuntabilitas publik yang diemban STIK.

Terdapat beberapa tahapan kegiatan yang perlu dilakukan STIK dalam upaya penguatan budaya akademik.

**1. Memformulasikan Kembali (norma dan nilai yang akan dikuatkan ), melalui tahapan identifikasi, seleksi dan determinasi.**

Terdapat beberapa sumber nilai yang dapat dipertimbangkan dalam memformulasi norma/nilai yang akan dikembangkan, yaitu: (1) visi, misi dan tujuan STIK; (2) nilai manajemen, seperti: profesionalisme, obyektifitas, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas; (3) nilai lokal, seperti: keberagamaan (religi), kesederhanaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, kebersamaan, dan sebagainya; (4) nilai nasional: visi pendidikan nasional, UUSPN, peraturan pendidikan, kurikulum nasional, kehidupan nasional; (5) nilai global: IPTEK dan modernitas; (6) nilai kelompok: agama dan adat istiadat kelompok; dan (7) nilai individu: agama, kepercayaan, sikap serta kebiasaan.

**2. Menentukan Strategi**

Strategi yang dapat ditempuh diantaranya adalah: (1) penyadaran secara penetrasi kepada warganya melalui pengintegrasian budaya yang akan dikembangkan ke dalam bentuk program akademik, (2) pendekatan regulatif yang dilakukan melalui pemaksaan dengan cara menerapkan aturan-aturan berikut sanksinya secara jelas dan terukur.

**3. Implementasi, yaitu upaya menerapkan budaya akademik yang disepakati warga secara konsisten, yang dilakukan melalui: (1) sosialisasi, yaitu upaya pengenalan, pemahaman tentang norma dan nilai yang harus diikuti, (2) pengendalian, yaitu kegiatan mengontrol, mekanisme/proses implementasi budaya kerja yang telah ditetapkan, (3) mengidentifikasi kelemahan mekanisme/proses implementasi guna melakukan perbaikan implementasi.**

Untuk mewujudkan program strategi penguatan budaya akademik tersebut, pada tataran mikro-institusional, perlu diformulasikan beberapa kegiatan akademik berikut.

1. Pengembangan diskusi interen (tingkat Prodi,/Perguruan Tinggi) secara intensif, sinambung dan kontinyu tentang berbagai isu aktual atau isu bidang keahliannya. Upaya ini sangat bermanfaat guna membuka wawasan dan membangun sikap kritis dan budaya akademik;
2. Pengembangan hubungan dan jaringan kerjasama akademik. Disamping bermanfaat sebagai wahana *academic exercises*, upaya ini berguna bagi pengembangan *human relation skills* yang menjadi modal utama bagi pengembangan keprofesionalan lulusan.
3. Pengembangan publikasi ilmiah. Upaya ini berguna bagi pembentukan citra akademik. Popularitas prestasi dan prestise yang terciptakan dalam masyarakat luas. Citra sebuah perguruan tinggi sebagai pusat peradaban sangat tergantung pada sejauhmana publikasi produk akademik yang dilakukan. Untuk itu, pemberian kesempatan seluas mungkin kepada warga kampus untuk terlibat dalam kegiatan ilmiah, seperti: pertemuan dan publikasi ilmiah perlu ditradisikan di lingkungan kampus perlu dilakukan;
4. Penumbuhan/pengembangan etos ilmiah dan keyakinan profesionalisme sebagai “*way of life*”, seperti penumbuhan kesadaran dan kepercayaan diri sebagai pekerja profesi (=yang berorientasi pada profesi, memihak pada prinsip-prinsip profesionalisme (seperti prinsip: obyektivitas/kebenaran, kejujuran, kepakaran, akuntabilitas manajerial ilmiah);
5. Penumbuhan kesadaran inovasi dan kreativitas yang dilakukan dengan cara mendorong dan merangsang komunitas untuk membangun kepercayaan ilmiah dan keunggulan akademik, melalui penguatan keberanian untuk melakukan perubahan secara terus menerus sesuai tuntutan masyarakat pengguna, baik lokal, nasional maupun global;
6. Pengembangan pola interaksi atau pola komunikasi yang demokratik, terbuka dan profesional
7. Pengembangan komunitas atau kelompok-kelompok ilmiah, seperti: *study centers*, kelompok studi, kelompok diskusi, dan sejenisnya;
8. Pelengkapan infrastruktur akademik
  - a. Pelengkapan perpustakaan :
    - 1) Ketersediaan & kelengkapan koleksi utamanya jurnal dan e-book dan data.
    - 2) Aksesabilitas (kemudahan diakses);
    - 3) Petugas profesional (pustakawan);
    - 4) *Service time* (waktu buka layanan) yang cukup/memadai sesuai kebutuhan pengguna.
  - b. Pelengkapan Laboratorium sebagai tempat pengujian, penelitian untuk menemukan sesuatu terkait dengan disiplin ilmu kepolisian;
  - c. Pelengkapan tempat, jaringan dan koneksi listrik

## **Simpulan dan Rekomendasi**

### **Simpulan**

Menjawab pokok permasalahan serta merujuk pada analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembenahan kurikulum perlu dilakukan dengan melibatkan semua Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Polri secara menyeluruh untuk lebih mensinergikan pencapaian visi dan misi bersama POLRI
2. Masyarakat dan pengguna lulusan memiliki persepsi yang positif atas kinerja alumni. Namun demikian terdapat beberapa hal yang menjadi penekanan untuk peningkatan kompetensi lulusan diantaranya peningkatan keterampilan interpersonal dan integritasnya
3. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk merespon dan mengantisipasi dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat modern. Mekanisme penyusunan visi dan kurikulum telah dilakukan dengan baik dengan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan pengguna lulusan. Visi yang dirumuskan oleh STIK sangat jelas dan realistic sehingga mudah dipahami serta dapat direalisasikan dalam pembelajaran. Nilai dasar yang dituangkan sebagai *University Learning Outcome* telah dirumuskan dalam Pilar Pendidikan di STIK. Pilar Pendidikan sebagai *University Learning Outcome* diperlukan rumusan yang terukur.

### Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari analisis dokumen dan wawancara mendalam, maka rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pihak terkait yaitu:

1. Perlu dilakukan penyusunan Sisdik Polri sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Polri secara menyeluruh dan terpadu. Kebijakan tata kelola kurikulum STIK dibedakan dengan satuan pendidikan lainnya dengan merujuk pada perundangan Pendidikan Tinggi dan Kedinasan
2. Perlu adanya penyamaan persepsi terhadap kebijakan akademik dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersama dengan Lembaga Sistem Pendidikan di POLRI untuk penyusunan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran, Pembentukan Mata Kuliah, Bahan Ajar, dan Penilaian.
3. Diperlukan audit kurikulum untuk lebih memperdalam temuan penelitian yang merujuk pada ketentuan kurikulum PT dan kajian pendukung sebagai uji empiris terhadap kualitas kurikulum dengan kinerja lulusan.

### Daftar Pustaka

- Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- AUN-QA. (2015). *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0*. Bangkok: ASEAN University Network.
- Blakemore, B. and Simpson, K., 2010. A comparison of the effectiveness of pre-and post-employment modes of higher education for student police officers. *The police journal*, 83 (1), 29–41.
- Bin, J. O. (2015, Desember 24). *Living Better*. (AUN-QA Network) Retrieved Maret 2016, 2016, from <http://livingbetterforhappiness.blogspot.co.id/2015/12/the-ten-principles-behind-aun-qa-model.html>

- Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2018 yang diterbitkan oleh Dirjen Belmawa Kemenristekdikti.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2018). *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Edisi III Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2015). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. (2018, Oktober 30). Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018*. Jakarta, DKI, Indonesia: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Rektor nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembelajaran di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
- Presiden Republik Indonesia. (2012, Agustus 10). Pendidikan Tinggi. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2012, Januari 17). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Provus, M. M. (1969). *The Discrepancy Evaluation Model: An Approach to Local Program Improvement and Development*. Washingto D.C.: Pittsburgh Public Schools. Retrieved July 14, 2016, from <http://eric.ed.gov/?id=ED030957>.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.